

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DI TIMUR TENGAH

Arab Saudi merupakan pimpinan koalisi penyerangan yang dilakukan negara teluk terhadap militan Houthi di Yaman, Arab Saudi juga merupakan pelopor pendiri beberapa organisasi peduli Timur Tengah dalam perantasan kemiskinan dan kedamaian di semenanjung Arab, ada banyak faktor yang melatar belakangi Arab Saudi melakukan upaya-upaya tersebut, tentu untuk mengenali dan dapat memahaminya kita perlu mengetahui bagaimana bentuk dari Negara Arab Saudi baik dari sistem pemerintahan hingga politik luar negerinya. Berikut akan kita bahas mengenai berbagai elemen-elemen dari Negara Arab Saudi

A. Sistem Pemerintahan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang menjadi pusat dan peradaban islam. Negara dengan penduduk lebih kurang 27 juta jiwa ini merupakan tanah suci bagi umat islam.²⁶ Karena merupakan negara yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi di dunia, Arab Saudi selalu dipandang sebagai satu kekuatan dari kawasan Arab yang sering sekali di mintai pendapat dan masukan terhadap permasalahan dunia yang sedang terjadi.

Sistem pemerintahan Arab Saudi disusun berdasarkan undang- undang kenegaraan, yang termaktub dalam peraturan-peraturan kerajaan, yang

²⁶ Anneahira “system pemerintahan Arab Saudi” July 6, 2015. dalam <http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan-arab-saudi.htm>

berdasar pada ajaran Islam dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam hukum syariat islam. Bentuk negara ini sendiri adalah monarki absolut dimana raja merupakan kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima angkatan bersenjata Arab Saudi.²⁷

Berdasarkan sistem pemerintahan yang ada, konstitusi yang berlaku di negara ini merujuk pada kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, segala pelaksana hukum di wilayah ini dilaksanakan sepenuhnya dengan mengikuti pedoman Hukum Islam (Syariah). Pengaturan sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah dan warga negara di tetapkan melalui *Basic Law of Government* yang disahkan pada 1992.

Arab Saudi tidak mengenal sistem kepartaian dalam pemerintahannya. Tidak ada pemilihan umum. Kalaupun ada, hanya untuk memilih setengah anggota dewan kota praja (Municipality Council), karena raja juga berhak sepenuhnya menentukan pemimpin lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif yang semuanya bernaung di bawah perintah kerajaan.²⁸

1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan

Saat ini, Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Selain sebagai pemimpin negara, Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud juga merangkap jabatan sebagai perdana menteri yang mengepalai pemerintahan. Sistem pemerintahan Arab Saudi itu sendiri mengenal adanya wakil perdana menteri yang bertugas membantu perdana menteri dalam setiap tugas pemerintahan. Wakil perdana menteri

²⁷ Ilmakribo "system pemerintahan Saudi Arabia July 6, 2015. dalam <https://ilmakribooo.wordpress.com/2013/12/26/sistem-pemerintahan-saudi-arabia/>.

²⁸ Arab Saudi July 6, 2015. dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi

dalam jajaran sistem pemerintahan Arab Saudi juga bertindak sebagai pejabat menteri pertahanan dan dirgantara, serta inspektur jendral.

Untuk urusan pemerintahan dalam negeri Arab Saudi, terdapat wakil perdana menteri yang juga merangkap jabatan sebagai menteri dalam negeri. Selain itu, wakil perdana menteri II juga bertindak sebagai komite tinggi haji yang menjamin pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik setiap tahunnya.

2. Mekanisme Pergantian Kekuasaan di Arab Saudi

Sebagai negara monarki absolut, pewarisan kekuasaan di kerajaan Arab Saudi diberikan kepada anak maupun cucu yang paling mampu memimpin negara Arab Saudi yang di ambil dari keluarga pendiri Arab Saudi, yakni Abdulaziz bin Abdul Rahman Al-Saud. Seiring berjalannya waktu, sejak 20 Oktober 2006 secara efektif berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa "Undang-undang pewaris tahta kerajaan di amandemen oleh Raja Abdullah dengan membentuk suksesi kerajaan atau disebut sebagai *Allegiance Institution*."²⁹

Lembaga suksesi ini terdiri atas anak serta cucu raja, yang bertugas memilih pengganti raja melalui mekanisme pemungutan suara untuk menentukan siapa yang dipilih sebagai raja, yang nominasinya ditentukan oleh raja. Jadi setelah amandemen undang-undang tersebut, raja tidak memiliki hak penuh dalam memilih putera mahkota untuk menggantikannya suatu saat nanti.

²⁹ awangygx“system pemerintahan Arab Saudi”, p.1, (October 16,2019).
<https://www.scribd.com/doc/25323327/Sistem-Pemerintahan-Arab-Saudi>

B. Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Pengaruhnya

Selama abad ke-20, Arab Saudi muncul sebagai bangsa bersatu dan menjadi pemimpin dunia baik dibidang sosial ekonomi dan politik. Dipandu oleh kebijakan luar negeri yang berfokus pada persatuan Arab, solidaritas Islam dan hidup berdampingan secara damai, Arab Saudi berada di milenium baru pendukung kuat perdamaian, keamanan dan kerja sama yang konstruktif di seluruh dunia. Arab Saudi memiliki sebuah kebijakan luar negeri menjadi Negara non-blok, tujuan tersebut untuk menjaga stabilitas dan keamanan serta posisi penting pada dan di semenanjung Arab, selain itu sebagai pengeksport minyak terbesar Arab Saudi juga menjaga hubungan kerjasama antara negara pengeksport minyak dan negara yang menjadi konsumen minyak tersebut.

Kebijakan Arab Saudi menyatakan ke fokusannya dalam kerjasama dengan Negara-negara Teluk pengeksport minyak, guna menstabilkan harga minyak dunia dan mendorong sumber energi alternatif selain minyak. Sebagai negara anggota pendiri OPEC Arab Saudi memiliki peranan penting dalam memberikan kebijakan harga minyak dunia guna mendapatkan pendapatan dalam jumlah besar.

Untuk sebuah bangsa yang dibangun di atas prinsip-prinsip islam, menegakkan islam dan melindungi kepentingan islam adalah landasan kebijakan luar negeri Saudi di bawah Raja Abdulaziz. Hari ini, Arab Saudi adalah negara yang dilihat secara aktif dicari oleh kekuatan global mencari pemahaman yang lebih baik dari isu-isu islam dan Arab. Diplomasi Kerajaan dianggap sebagai faktor utama dalam mencegah krisis.

Arab Saudi telah datang untuk menjadi pusat dari urusan dunia, karena Kerajaan belum dibatasi perannya dalam membela dan mempromosikan kepentingan nasional sendiri. Sebagai tempat kelahiran Islam, Arab Saudi memiliki tempat khusus di hati satu miliar muslim yang tersebar di seluruh dunia. Di pandu oleh prinsip-prinsip yang di anut oleh Islam dan berakar pada warisan Arab, Arab selama beberapa dekade berhasil mengambil tanggung jawab terkait dengan status itu.³⁰

Pertama : Lingkaran Teluk

Sejak kerajaan Arab Saudi berdiri yang didirikan oleh pendirinya King Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud, lingkaran teluk, dianggap sebagai lingkaran utama dari kebijakan luar negeri kerajaan karena berbagai alasan tertentu. Dalam pertimbangan lingkaran teluk diberikan untuk hubungan darah, hubungan historis, lingkungan geografis dan uniknya membawa serikat Arab teluk bersama-sama dalam membangun segala kesamaan selain kesamaan sistem politik dan ekonomi yang ada. Kerajaan dan negara-negara teluk lainnya percaya pada kesamaan di antara mereka dan berdasarkan keinginan mereka untuk menyatukan dan mengkoordinasikan kebijakan bersama, keamanan dan pertahanan selama krisis besar dan konflik yang mengelilingi dan mempengaruhi daerah dalam cara yang berbeda, para pemimpin negara-negara teluk setuju pada tahun 1981 untuk membuat (Dewan Kerjasama untuk Negara Arab Teluk - GCC) menjadi kerangka organisasi yang menyadari kerjasama komprehensif dan konteks integrasi,

³⁰ Issue Foreign Relation July 7, 2015 dalam <http://www.saudiembassy.net/issues/foreign-relations/>.

bertujuan untuk memenuhi keinginan dan aspirasi negara-negara teluk, pada tingkat resmi dan publik di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan lain-lain.³¹

Kebijakan luar negeri Arab Saudi di Lingkungan Teluk berdasarkan prinsip dan kepentingan utama mereka

- Keamanan dan stabilitas kawasan adalah tanggung jawab negara daerah.
- Serikat Teluk memiliki hak untuk mempertahankan keamanan mereka dan mempertahankan kemerdekaan mereka, sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri dan yang dijamin oleh hukum internasional untuk menghadapi setiap tantangan internal maupun internasional.
- Meminimalisir campur tangan dalam urusan internal negara- negara kawasan, dan bekerja sama untuk melawan setiap agresi yang dilakukan pada salah satu anggota negara, berkaitan dengan agresi apapun, pada saat yang sama negara-negara anggota menganggap agresi pada satu negara serikat sebagai agresi pada semua anggota negara serikat.
- Memperkuat kerjasama antara kerajaan dan negara-negara anggota GCC di berbagai bidang diantaranya bidang politik, ekonomi, keamanan, bidang sosial budaya dan lain-lain, melalui pendalaman dan mengkonsolidasikan hubungan serta ikatan antara negara-negara anggota.
- Mengkoordinasikan kebijakan GCC bila memungkinkan, terutama terhadap isu-isu penting regional dan internasional. Kerjasama dan

³¹ Takeyh, Ray “the new saudi foreign policy” .July 24, 2015. dalam <http://www.cfr.org/saudi-arabia/new-saudi-foreign-policy/p36456>

koordinasi seperti itu dibutuhkan selama krisis terjadi seperti selama perang Irak-Iran, dan invasi Irak ke Kuwait.

- Mengambil tindakan serius dan gigih untuk menyelesaikan semua perselisihan (terutama sengketa perbatasan) antara negara-negara di wilayah itu melalui pemahaman yang didasarkan pada prinsip-prinsip persaudaraan dan tetangga yang baik.
- Pentingnya koordinasi ekonomi antara negara-negara anggota melalui dukungan terus menerus untuk menyatukan kebijakan ekonomi dan membangun konteks terpadu, memberikan perhatian khusus untuk koordinasi sehubungan dengan kebijakan minyak dari negara-negara anggota dengan cara melayani kepentingan mereka, mengingat bahwa minyak adalah sumber strategis negara-negara tersebut.

Kedua : Lingkaran Arab

Kerajaan Arab Saudi menyadari pentingnya tindakan bersama negara Arab dalam penyatuan sikap negara-negara Arab. Kerajaan dan enam negara merdeka Arab lainnya dalam upaya mencari jalan untuk mengatur mekanisme dan mengkoordinasikan hubungan negara Arab. Serta aksi bersama untuk melayani kepentingan dan isu-isu negara-negara tersebut. Akibatnya, pada bulan Maret 1945 Negara Arab membentuk Liga Arab dan ditandatangani pada piagamnya.³²

³² Saudi Arabia's muscular foreign policy . bbc. July 27, 2015 dalam [htJp://www.bbc.com/news/world-middle-east-32381798](http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32381798)

Kebijakan luar negeri Arab Saudi di Lingkungan Arab berdasarkan prinsip dan kepentingan utama mereka

Hubungan yang tak terelakkan antara nasionalisme-Arab dan Islam. Kerajaan dibedakan dengan menjadi tempat kelahiran Islam dan asal nasionalisme-Arab. Tren ini selalu di tekankan oleh Arab Saudi sejak era pendirinya Raja Abdulaziz, dan anak serta pengikutnya.³³ Kebutuhan solidaritas Arab, bersama-sama dengan koordinasi antara negara-negara Arab dengan tujuannya untuk menyatukan sikap Arab dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya dari negara-negara Arab untuk . melayani kepentingan Arab. Realisme yang di wakili dalam menghindari slogan dan over akting yang negatif mempengaruhi keamanan dan stabilitas dunia Arab, dan mencegah campur tangan dalam urusan internal Arab. Prinsip komitmen pada persaudaraan Arab menawarkan semua jenis dukungan dan bantuan.

Karena dalam kenyataannya bahwa kerajaan memiliki posisi terkemuka dan kredibilitas di dunia Arab, serta menikmati logika dan keseimbangan kebijakan, telah memainkan peran penting kejujuran dan keadilan dalam melakukan mediator untuk menyelesaikan sengketa Arab (internal dan regional). Selain itu, Kerajaan telah mengerahkan upaya rekonsiliasi besar mengarah pada penghapusan kontroversi Arab, yang menghancurkan persatuan Arab.

Dalam hal ini, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan perhatian

³³ It's time to stop holding arab Saudi foreign policy .July 27, 2015. dalam <http://foreignpolicy.com/2015/05/12/its-time-to-stop-holding-saudi-arabias-hand-gcc-summit-camp-david/>.

khusus pada masalah Palestina, mengingat isu utama Arab dan Muslim, dan elemen utama dari kebijakan luar negeri Kerajaan. Tidak heran, sejak era Raja Abdulaziz Al-Saud, Kerajaan memikul tanggung jawab membela isu Palestina di semua arena internasional, dan tidak pernah tinggal hidup atau berlama-lama dalam satu hari atau di bawah pembenaran apapun untuk mendukung masalah ini, sebaliknya kerajaan dikhususkan dirinya sendiri untuk melayani masalah Palestina guna mewujudkan solusi yang sah dan penyelesaian yang adil.³⁴

Ketiga : Lingkaran Islam

Islam selalu menjadi faktor yang paling penting dalam mempengaruhi penentuan prioritas kebijakan luar negeri kerajaan. Karena dasar dari kerajaan Arab Saudi, kerajaan bekerja untuk mengabdikan dan mendedikasikan potensi dan sumber dayanya untuk melayani masalah dunia islam dan mencapai motif solidaritas dan persatuan berdasarkan fakta belongingness satu keyakinan.³⁵ Simbiosis islam adalah metode untuk mendapatkan kembali posisi muslim dan kehormatan.

Demi mencapai solidaritas islam, Kerajaan mencari dan memulai bersama-sama dengan negara-negara islam untuk membangun sistem pemerintahan islam dan organisasi non-pemerintah, di antaranya adalah Liga Muslim Dunia, didirikan pada tahun 1962, dan Organisasi Konferensi Islam yang didirikan pada tahun 1969, Upaya ini berasal dari citra komprehensif

³⁴ Foreign relation of Saudi Arabia. July 27, 2015. dalam

³⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Saudi_ArabiaThe foreign policy of the kingdom of Saudi Arabia July 27, 2015. dalam <http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/KingdomForeignPolicy/KingdomPolicy34645.aspx>

makna solidaritas islam yang mencakup beberapa konsep, konsep utama adalah keamanan kolektif negara-negara islam, dan bekerja untuk perdamaian dan perselisihan antara negara-negara islam, dan memberikan bantuan ekonomi untuk negara-negara islam dan masyarakat, memberikan bantuan darurat kepada negara-negara islam yang terkena dampak bencana, dan membela masalah mereka serta memberikan dukungan moral dan material kepada kelompok-kelompok Islam di mana pun mereka berada, melalui sumbangan dalam membangun masjid, dan mendirikan pusat-pusat peradaban islam.

Kita dapat mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam lingkaran islam bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Mencapai solidaritas islam yang komprehensif.
- Membuka cakrawala baru untuk kerjasama ekonomi di antara negara-negara islam yang bertujuan member dukungan terhadap potensi dan sumber daya mereka pada tingkat yang berbeda.
- Melawan berbagai jenis dan teknik overflow budaya dan invasi intelektual yang mengancam dunia islam.
- Bekerja untuk mengembangkan Organisasi Konferensi Islam dan mendukung kegiatan untuk mencapai lebih efektif dalam menghadapi isu-isu yang dihadapi oleh dunia Islam.
- Mengaktifkan peran negara-negara Islam dalam kerangka tatanan dunia baru. Memberikan bantuan dan dukungan untuk minoritas muslim di seluruh dunia, dan menjaga hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum internasional.

- Memperkenalkan gambar nyata dan kebenaran dari islam dan syaria'a hukum toleransi, dan melindungi islam dari semua tuduhan yang tidak jelas dan fitnah yang ditujukan kepada islam, seperti; terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia.

Keempat : Lingkaran Internasional

Dalam lingkaran internasional, Kerajaan Arab Saudi sangat tertarik untuk membangun hubungan yang setara dengan kekuatan besar yang terhubung dengan kerajaan melalui serangkaian kepentingan, kepentingan-kepentingan ini muncul sebagai akibat dari meningkatnya peran utama kerajaan di kedua dunia Arab dan islam . Dimana kerajaan berusaha keluar melalui kedua dunia untuk memperluas langkah Saudi pada tingkat masyarakat internasional, dan karena itu mencoba untuk bereaksi dengan pusat kebijakan internasional yang efektif dan signifikan, dengan mempertimbangkan konsekuensi dan tanggung jawab yang dihasilkan dari kebijakan ini.³⁶

Kerajaan Arab Saudi bangga menjadi anggota pendiri PBB pada tahun 1945. Kerajaan sangat percaya bahwa perdamaian internasional merupakan bagian dari kebijakan luar negeri nya. Kerajaan selalu memanggil untuk lebih transparan dan keadilan dalam pengobatan antara negara-negara, dalam hal bidang politik, ekonomi, sosial, dan lainnya.³⁷ Karena keadilan adalah satu-

³⁶ Yemen and new direction in Saudi foreign policy. July 27, 2015. dalam <http://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/4/23/yemen-and-a-new-direction-in-saudi-foreign-policy>

³⁷ Saudi foreign policy . July 27, 2015. dalam

satunya metode untuk berkembang, kesejahteraan, dan stabilitas dunia. Dengan demikian, kerajaan tidak percaya dalam menggunakan listrik sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya. Pada saat yang sama, kerajaan percaya pertahanan diri yang sah sebagai dasar hukum internasional.

Kerajaan percaya pada peran yang dimainkan oleh PBB dan badan-badan khusus afiliasinya dan organisasi internasional juga, dan dukungan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat internasional di segala bidang, terutama, dukungan mereka untuk keamanan dan perdamaian internasional.³⁸ Kerajaan telah bergabung semua organisasi ini dan telah tertarik untuk mendukung sistem internasional ini dengan semua sarana moral dan material dan metode, selain untuk mempertahankan partisipasi aktifnya dalam kegiatan mereka.

<http://www.arabnews.com/news/778916>

³⁸ Nasser, Nicolas. "No" Arab Spring" in the Saudi Kingdom Riyadh's Foreign Policy and 'The Saudi-Led Counterrevolution" July 27, 2015. dalam <http://www.globalresearch.ca/no-arab-spring-in-the-saudi-kingdom-riyadh-s-foreign-policy-and-the-saudi-led-counterrevolution/5374583>